



RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2020

Dinas Kehutanan

Provinsi Kalimantan Timur

Samarinda, Pebruari 2020



KATA PENGANTAR

Sesuai dengan INPRES Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan, dimana salah satu kegiatan yang harus dilaksanakan adalah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 merupakan penjabaran dari Renstra SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023, dimana RKT Tahun 2020 memuat sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020.

Dengan disusunnya RKT Tahun 2020 diharapkan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja Tahun 2020 dan sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kehutanan.

SAMARINDA, FEBRUARI 2020

**KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



**H. AMRULLAH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19611214 198703 1 010**



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	1
1.3. Sasaran.....	2
1.4. Dasar Hukum.....	2
II. VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	4
2.1. Visi dan Misi.....	4
2.2. Tujuan dan Sasaran.....	5
2.2.1. Tujuan.....	5
2.2.2. Sasaran.....	6
III. PERENCANAAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2019.....	7
3.1. Program dan Penjabaran Program Dinas Kehutanan Tahun 2019	7
3.2. Cara Melaksanakan Kegiatan.....	9
3.3. Indikator Kinerja Utama.....	12
IV. PENUTUP.....	15



DAFTAR TABEL

Tabel Tujuan	5
Tabel Sasaran	6
Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020	14
Tabel Sasaran Strategis Dinas Kehutanan Tahun 2020	27



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Selanjutnya berkaitan dengan aspek pengelolaan kinerja instansi, telah disusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang selaras dengan rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja. Dimana Renstra memberikan arah pembangunan jangka menengah, sedangkan rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja merupakan target dan komitmen kinerja yang akan diwujudkan pada suatu tahun tertentu. Dimana rencana kerja disusun sesuai dengan ketersediaan alokasi anggaran, yang dituangkan dalam suatu penetapan kinerja. Dalam rangka perencanaan kinerja OPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur maka disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020.

1.2. Maksud dan Tujuan

RKT Tahun 2020 dimaksudkan sebagai penjabaran dan Rencana Strategis dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaksanaan kinerja OPD Dinas Kehutanan, sedangkan tujuan yang akan dicapai adalah :

- a. Menyusun RKT OPD Dinas Kehutanan Tahun 2020;
- b. Menyediakan arah penyusunan Penetapan Kinerja (PK) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;



- c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja OPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

1.3. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dari RKT OPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 adalah:

- a. Tersusunnya RKT OPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur secara baik dan terukur;
- b. Tersedianya arahan penyusunan Penetapan Kinerja (PK) OPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020;
- c. Meningkatnya efisiensi, efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja OPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

1.4. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RKT adalah :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
- c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- d. Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



- e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

2.1. Visi dan Misi

Dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi sumber daya kehutanan (SDA, SDM, Sumber Daya Buatan dan Teknologi) saat ini dan tantangan ke depan serta memperhatikan visi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023 adalah sebagai berikut : " Berani untuk Kalimantan Timur yang Berdaulat ".

Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan berada pada Misi kedua Gubernur yaitu : " Berdaulat untuk pemberdayaan Ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan "

2.2. Tujuan dan Sasaran

2.2.1. Tujuan

Tujuan yang dimaksud adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk Tujuan dan Sasaran, serta Program Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim tahun 2019 – 2023 yang dirumuskan sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Kehutanan Kaltim dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Penetapan tujuan dalam Renstra didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu strategis bidang kehutanan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Adapun rumusan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 adalah: **"Meningkatkan Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap Ekonomi Daerah"**.



Rumusan tujuan tersebut mengacu pada sasaran peningkatan kontribusi sektor kehutanan (Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur) terhadap upaya peningkatan ekonomi daerah dalam mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan untuk mendukung terwujudnya Kalimantan Timur yang Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.

Tujuan

Tujuan	Indikator	Target Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Tujuan 1. Meningkatkan Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap Ekonomi Daerah	Kontribusi Usaha Subsektor Kehutanan Terhadap PDRB (%)	1,00	1,05	1,10	1,15	1,20

2.2.2. Sasaran

Sasaran yang dimaksud adalah penjabaran tujuan secara terukur sebagai pencapaian secara nyata dari Dinas Kehutanan Kaltim pada 5 (lima) tahun mendatang. Sasaran jangka menengah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) periode tahun 2019-2023 dirumuskan sebagai berikut: **"Optimalisasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dalam Mendukung Peningkatan Perekonomian Daerah"**.

Pencapaian sasaran yang dirumuskan tersebut akan diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator, yakni realisasi produksi hasil hutan kayu (m³) dan realisasi produksi hasil hutan bukan kayu (ton). Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.



Tabel. Sasaran

Sasaran	Indikator	Target Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Sasaran 1. Optimalisasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dalam Mendukung Peningkatan Perekonomian Daerah	Realisasi Produksi Hasil Hutan Kayu (m ³)	4.850.000	4.900.000	4.950.000	5.000.000	5.050.000
	Realisasi Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (ton)	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0



BAB III

PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020

3.1. Program dan Penjabaran Program Dinas Kehutanan Tahun 2020

Program utama Dinas Kehutanan tertuang pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang selaras dengan Renstra, Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan penetapan kinerja. Dinas Kehutanan pada Tahun 2020 melaksanakan 18 program dan 56 kegiatan yang disajikan pada

Adapun Program dan Kegiatan Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini dilaksanakan karena dilandasi oleh kebutuhan akan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dimana didalam pelayanan kepada masyarakat diperlukan adanya sarana administrasi perkantoran yang memadai, disamping untuk memenuhi kebutuhan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur maupun UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun kegiatan-kegiatan dari Program Pelayanan Administrasi Perkantoran antara lain :

- 1) Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini dilaksanakan karena dilandasi atas pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana operasional perkantoran, pemeliharaan kendaraan operasional untuk kelancaran kegiatan sehingga terhindar dari kendaraan yang tidak laik operasional, pemeliharaan gedung kantor, pemeliharaan perlengkapan serta peralatan, sehingga baik gedung kantor beserta sarana dan prasarannya dapat digunakan dengan baik dan nyaman untuk mendukung tercapainya tujuan perangkat daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur .



Adapun kegiatan-kegiatan dari Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur antara lain :

- 1) *Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana*
- 2) *Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana*

3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

Program ini dimaksudkan untuk menyediakan jasa publikasi berupa spanduk, baliho, plakat, propaganda ataupun pameran, diharapkan program ini dapat memenuhi kebutuhan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur mengikuti kondisi yang berlaku. Termasuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan minum rapat dan kebutuhan koordinasi dan konsultasi lembaga Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun kegiatan-kegiatan dari Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah antara lain :

- 1) *Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah*
- 2) *Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur*

4. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan.

Program ini dilaksanakan sebagai salah kegiatan wajib mengikat yang harus dipenuhi yaitu penyediaan dokumen – dokumen yang merupakan dokumen perencanaan (RENSTRA, RENJA, RKA, DPA, PK, RKT, ROK) serta dokumen pelaporan (LKIP, LPPD, Evaluasi Renja, Pengukuran Kinerja, SPIP, Evaluasi Teptra) dimana dokumen dokumen tersebut merupakan bagian dari penilaian Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun kegiatan-kegiatan dari Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan antara lain :

- 1) *Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran*
- 2) *Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan*

5. Program Perencanaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan



Program ini memiliki tujuan memanfaatkan potensi sumberdaya hutan berkelanjutan dengan indikator program Prosentase luas hutan yang dikelola, program ini diharapkan dapat dilaksanakan dengan sumber dana APBD Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun kegiatan-kegiatan dari Program Perencanaan dan Pemanfaatan Kawasan adalah :

- 1) *Kegiatan Perencanaan dan Tata Hutan*
- 2) *Penyelesaian penggunaan tanah dalam kawasan hutan Perencanaan dan Tata Hutan*
- 3) *Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan*
- 4) *Kegiatan pendampingan RIL/RIL C pada IUPHHK-HA*
- 5) *Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan, Pemasaran dan PNB*

6. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)

Program ini adalah program prioritas Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dimana program ini dilaksanakan dengan Indikator Kinerja adalah Persentase Tutupan Lahan Meningkat.

Adapun kegiatan-kegiatan dari Program Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) antara lain :

- 1) *Pengelolaan DAS*
- 2) *Rehabilitasi Hutan dan Lahan*
- 3) *Perbenihan Tanaman Hutan*

7. Program Perlindungan dan KSDAE

Program ini memiliki indikator kinerja Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan.

Adapun kegiatan-kegiatan dari Program Perlindungan dan KSDAE adalah :

- 1) *Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan.*
- 2) *Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan*
- 3) *Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.*



8. Program Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial

Program ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengelola hutan dengan indikator kinerja adalah Luas Kawasan Hutan Dikelola Masyarakat.

Adapun kegiatan-kegiatan dari Program Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial antara lain :

- 1) *Penyuluhan Kehutanan.*
- 2) *Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial*
- 3) *Pembinaan Hutan Hak dan Hutan Adat*

9. Program Penyuluhan (DBH SDA DR)

Program ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengelola hutan dengan indikator kinerja adalah Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada Kelompok Tani Hutan (KTH), pelaksanaan Program ini menggunakan sumber dana DBH SDA DR.

Adapun kegiatan-kegiatan dari Program Penyuluhan (DBH SDA DR) antara lain :

- 1) *Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH)*
- 2) *Metode dan Materi Penyuluhan*
- 3) *Monitoring, Evaluasi, Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Penyuluh*

10. Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH SDA DR)

Program ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengelola hutan dengan indikator kinerja adalah Jumlah Usulan Izin Perhutanan Sosial, pelaksanaan Program ini menggunakan sumber dana DBH SDA DR.

Adapun kegiatan-kegiatan dari Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH SDA DR) antara lain :

- 1) *Penyiapan Perhutanan Sosial*
- 2) *Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial*
- 3) *Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat*
- 4) *Pembinaan*

11. Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)



Program ini dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti surat kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menyatakan bahwa Provinsi Kalimantan Timur adalah salah satu provinsi yang berpotensi tinggi terhadap kebakaran Hutan dan Lahan indikator kinerja adalah Persentase Luas Kebakaran Hutan menurun, pelaksanaan Program ini menggunakan sumber dana DBH SDA DR.

Adapun kegiatan-kegiatan dari Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR) antara lain :

- 1) *Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)*
- 2) *Pelatihan/Pembekalan/Inhousetraining/Penyegaran/Bimbingan Teknis PKHL (DBH SDA DR)*
- 3) *Penetapan Posko Dalkarhut (DBH SDA DR)*
- 4) *Penaksiran Luas Kebakaran dan Investigasi Penyebab Kebakaran (DBH SDA DR)*
- 5) *Sosialisasi/Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)*
- 6) *Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)*
- 7) *Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)*
- 8) *Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal Bekas Terbakar (DBH SDA DR)*
- 9) *Gerakan Pencegahan Kebakaran Hutan (DBH SDA DR)*
- 10) *Penerapan Agroforestry, Agrosilvopastura, Silvopastura (DBH SDA DR)*
- 11) *Pembentukan dan Pembinaan Brigade Pengendalian PKHL (DBH SDA DR)*

12. Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH SDA DR)

Program ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan perlindungan dan pengamanan hutan dari berbagai ancaman dengan indikator kinerja adalah Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang Ditangani, pelaksanaan Program ini menggunakan sumber dana DBH SDA DR.

Adapun kegiatan-kegiatan dari Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH SDA DR) antara lain :

- 1) *Sosialisasi*
- 2) *Koordinasi*
- 3) *Patroli Pengamanan*

13. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)



Program ini dilaksanakan dalam rangka melakukan rehabilitasi hutan dan lahan dengan indikator kinerja adalah Luas Hutan dan Lahan Kritis yang Direhabilitasi, pelaksanaan Program ini menggunakan sumber dana DBH SDA DR.

Adapun kegiatan-kegiatan dari Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH SDA DR) yaitu:

- 1) *Perencanaan*
- 2) *Pelaksanaan*
- 3) *Monitoring dan Evaluasi*

14. Program Pengembangan Perbenihan (DBH SDA DR)

Program ini dilaksanakan dalam rangka melakukan pengembangan perbenihan berupa penyediaan dan pengedaran bibit untuk menunjang kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dengan indikator kinerja adalah Surat Keterangan dan Jumlah Bibit, pelaksanaan Program ini menggunakan sumber dana DBH SDA DR.

Adapun kegiatan-kegiatan dari Program Pengembangan Perbenihan (DBH SDA DR) yaitu:

- 1) *Penyediaan Benih*
- 2) *Penyediaan Bibit*
- 3) *Pengedaran Benih dan Bibit*
- 4) *Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Benih*

15. Program Pengelolaan Tahura

Program ini dilaksanakan dalam rangka melaksanakan tupoksi UPTD Tahura yaitu melakukan pengelolaan terhadap kawasan hutan Tahura dengan indikator kinerja adalah Luas Kawasan Hutan Tahura yang Dikelola, pelaksanaan Program ini menggunakan sumber dana APBD Murni.

Adapun kegiatan-kegiatan dari Program Pengelolaan Tahura (DBH SDA DR) yaitu:

- 1) *Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan*
- 2) *Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat*

16. Program Pengelolaan KPHP

Program ini dilaksanakan dalam rangka melaksanakan tupoksi UPTD KPHP yaitu melakukan pengelolaan terhadap kawasan hutan dengan indikator



kinerja adalah Jumlah Unit Usaha Produktif Kehutanan oleh KPH dan Masyarakat melalui Pengelolaan Hutan Lestari dan Persentase Kerusakan Kawasan Hutan yang menurun (%), pelaksanaan Program ini menggunakan sumber dana APBD Murni.

Adapun kegiatan-kegiatan dari Program Pengelolaan KPHP yaitu:

- 1) *Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan*
- 2) *Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat*

17. Program Pengelolaan KPHL

Program ini dilaksanakan dalam rangka melaksanakan tupoksi UPTD KPHL yaitu melakukan pengelolaan terhadap kawasan hutan lindung dengan indikator kinerja adalah Persentase Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung, pelaksanaan program ini menggunakan sumber dana APBD Murni.

Adapun kegiatan-kegiatan dari Program Pengelolaan KPHL yaitu:

- 1) *Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan*
- 2) *Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat*

18. Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (DBH SDA DR)

Program ini dilaksanakan dalam rangka melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap program-program yang melaksanakan kegiatan sumber dana DBH SDA DR.

Adapun kegiatan-kegiatan adalah:

- 1) *Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian*

Dari 18 (enam belas) program yang direncanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, 13 (tiga belas) program adalah program teknis, dan 5 (lima) adalah program penunjang.

Program yang menjadi Prioritas yaitu

- 1) Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
- 2) Program Pengelolaan DAS dan RHL
- 3) Program Perlindungan dan KSDAE
- 4) Program Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan

Program yang tergolong Teknis yaitu

- 1) *Program Perencanaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan*
- 2) *Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)*



- 3) Program *Perlindungan dan KSDAE*
- 4) Program *Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial*

Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020

Dinas Kehutanan Prov. Kaltim Dan UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Prov. Kaltim

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT)	2020		
				Satuan	Target	Anggaran (000)
3.04.16	Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan		Realisasi Penerimaan PNPB Sektor Kehutanan	Milyar Rupiah	165 M	3.471.960
	01.	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan	Persentase Produksi Hasil Hutan Kayu (Realisasi/Target)	%	70	1.104.950
			Jumlah Perda Pembatasan Penjualan Kayu Bulat	Dokumen Draft Perda	0	
	02.	Kegiatan pendampingan RIL/RIL C pada IUPHHK-HA	Jumlah IUPHHK-HA Menerapkan RIL/RIL C	IUPHHK-HA	2	750.000
	03.	Kegiatan Perencanaan dan Tata Hutan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Tata Hutan	dokumen	9	620.500
	05.	Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan, Pemasaran dan PNPB	Persentase Penanganan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) pada Unit Manajemen	%	80	796.510
	06.	Penyelesaian penggunaan tanah dalam kawasan hutan	Jumlah Dokumen Penyelesaian	dokumen	6	200.000
3.04.39	Program Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan		Persentase Tutupan Lahan Meningkat	%	13,98%	1.194.850
	05.	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi	Ha	38.500 ha	220.000
	15.	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Jumlah DAS/Sub DAS yang Dimonitoring	DAS	3 DAS	660.850
	16.	Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah Laporan Peredaran dan Pengadaan Bibit	Laporan	10 Laporan	314.000
3.04.41	Program Perlindungan dan KSDAE		Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan	%	≤ 1,75 %	782.100
	24.	Kegiatan Pengendalian dan Pengamanan Hutan	Luas Hutan yang Dimanfaatkan Tanpa Izin yang semakin berkurang	Ha	1150 Ha	153.900
	25.	Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Luas Areal Kebakaran Hutan yang semakin menurun	Ha	24.500 Ha	108.900
	26.	Kegiatan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya	Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi yang meningkat	Ha	4.000 Ha	519.300
3.04.42	Program Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial		Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat	Ha	32.000 ha	2.330.970
	36.	Kegiatan Penyuluhan Kehutanan	Jumlah KTH/KUPS Terregistrasi	KTH	5 KTH	955.650
	37.	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Hutan	Luas Permohonan HD, HKM, HTR dan Kemitraan Kehutanan	Ha	35.000 ha	955.320
			Jumlah Unit Usaha Masyarakat Hutan.	Unit	10 unit	
	38.	Kegiatan Pembinaan Hutan Hak dan	Luas Pembinaan Wilayah	Ha	48,85 ha	420.000



	Hutan Adat	Hutan Adat/Hutan Hak			
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH SDA DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH	Unit Usaha	5	11.152.755
01.	Pendampingan Kegiatan RHL	Jumlah Pendampingan Kegiatan RHL		55	1.544.055
	Dinas Kehutanan			0	-
	KPHP Berau Barat			0	-
	KPHP Bongan			4	350.000
	KPHP Meratus			5	269.055
	KPHP Kendilo			6	125.000
	KPHP Santan			0	-
	KPHP DAS Belayan			0	-
	KPHP Bengalon			0	-
	KPHP Batu Ayau			40	800.000
	Tahura Bukit Soeharto			0	-
02.	Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH)	Jumlah Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH)		51	1.405.000
	Dinas Kehutanan			0	-
	KPHP Berau Barat			5	200.000
	KPHP Bongan			6	350.000
	KPHP Meratus			0	-
	KPHP Kendilo			15	145.000
	KPHP Santan			0	-
	KPHP DAS Belayan			0	-
	KPHP Bengalon			5	210.000
	KPHP Batu Ayau			20	500.000
	Tahura Bukit Soeharto			0	-
03.	Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH)	Jumlah Peserta Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH)	Peserta	1.970	4.872.725
	Dinas Kehutanan			50	773.025
	KPHP Berau Barat			0	-
	KPHP Bongan			100	420.000
	KPHP Meratus			500	937.000
	KPHP Kendilo			300	189.600
	KPHP Santan			90	750.000
	KPHP DAS Belayan			900	1.573.100
	KPHP Bengalon			30	230.000
	KPHP Batu Ayau			0	-
	Tahura Bukit Soeharto			0	-
04.	Metode dan Materi Penyuluhan	Jumlah Laporan Metode dan Materi Penyuluhan	Laporan	24	2.559.925
	Dinas Kehutanan			4	1.409.925
	KPHP Berau Barat			0	-
	KPHP Bongan			0	-
	KPHP Meratus			0	-
	KPHP Kendilo			0	-
	KPHP Santan			2	250.000
	KPHP DAS Belayan			0	-
	KPHP Bengalon			0	-
	KPHP Batu Ayau			10	100.000
	Tahura Bukit Soeharto			8	800.000
06.	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Penyuluh	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penyuluh	Laporan	74	771.050
	3.5.1. Dinas Kehutanan			15	389.050
	3.5.2. KPHP Berau Barat			0	-
	3.5.3. KPHP Bongan			0	-
	3.5.4. KPHP Meratus			0	-



	3.5.5.	KPHP Kendilo			15	40.000
	3.5.6.	KPHP Santan			0	-
	3.5.7.	KPHP DAS Belayan			0	-
	3.5.8.	KPHP Bengalon			4	142.000
	3.5.9.	KPHP Batu Ayau			40	200.000
	3.5.10.	Tahura Bukit Soeharto			0	-
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)		Jumlah Usulan Izin Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah Usulan	35	25.034.575
	01.	Penyiapan Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Pendampingan, dan Fasilitas	Laporan	73	6.475.220
		Dinas Kehutanan			4	1.050.000
		KPHP Berau Barat			8	735.670
		KPHP Bongan			6	720.000
		KPHP Meratus			8	771.200
		KPHP Kendilo			15	793.000
		KPHP Santan			10	850.000
		KPHP DAS Belayan			10	900.000
		KPHP Bengalon			2	227.350
		KPHP Batu Ayau			10	428.000
		Tahura Bukit Soeharto			0	0
	02.	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Laporan	63	11.877.955
		Dinas Kehutanan			6	1.028.000
		KPHP Berau Barat			10	2.488.480
		KPHP Bongan			0	0
		KPHP Meratus			6	677.725
		KPHP Kendilo			6	3.180.000
		KPHP Santan			0	1.900.000
		KPHP DAS Belayan			11	1.528.750
		KPHP Bengalon			2	575.000
		KPHP Batu Ayau			22	500.000
		Tahura Bukit Soeharto			0	0
	03.	Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	Jumlah Kegiatan Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat	Laporan	57	5.855.520
		Dinas Kehutanan			4	1.350.000
		KPHP Berau Barat			5	951.970
		KPHP Bongan			4	370.000
		KPHP Meratus			10	325.000
		KPHP Kendilo			6	142.000
		KPHP Santan			2	450.000
		KPHP DAS Belayan			0	0
		KPHP Bengalon			4	216.550
		KPHP Batu Ayau			10	500.000
		Tahura Bukit Soeharto			12	1.550.000
	04.	Pembinaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Konflik Tenurial dan Hutan Adat	Laporan	28	825.880
		Dinas Kehutanan			0	0
		KPHP Berau Barat			0	0
		KPHP Bongan			0	0
		KPHP Meratus			0	0
		KPHP Kendilo			15	145.300
		KPHP Santan			0	0
		KPHP DAS Belayan			0	0
		KPHP Bengalon			2	180.580
		KPHP Batu Ayau			11	500.000



		Tahura Bukit Soeharto			0	0
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)		Persentase Luas Kebakaran Hutan dan lahan menurun	%	0,25	78.495.300
6.1	Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)		Jumlah Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan	Unit	5519	31.975.006
	6.1.1	Dinas Kehutanan			10	850.000
	6.1.2	KPHP Berau Barat			80	700.000
	6.1.3	KPHP Bongan			55	4.120.000
	6.1.4	KPHP Meratus			7	787.400
	6.1.5	KPHP Kendilo			550	4.065.000
	6.1.6	KPHP Santan			15	2.498.067
	6.1.7	KPHP DAS Belayan			4031	3.921.055
	6.1.8	KPHP Bengalon			11	5.072.217
	6.1.9	KPHP Batu Ayau			10	2.000.000
	6.1.10	Tahura Bukit Soeharto			750	7.961.267
6.2	Pelatihan/Pembekalan/Inhousetraining/ Penyegaran/Bimbingan Teknis PKHL (DBH SDA DR)		Jumlah Pelatihan/ Pembekalan/Inhouse Training	Kegiatan	109	7.038.132
	6.2.1	Dinas Kehutanan			20	1.000.000
	6.2.2	KPHP Berau Barat			20	527.540
	6.2.3	KPHP Bongan			4	370.000
	6.2.4	KPHP Meratus			2	327.200
	6.2.5	KPHP Kendilo			6	372.000
	6.2.6	KPHP Santan			20	750.000
	6.2.7	KPHP DAS Belayan			12	771.814
	6.2.8	KPHP Bengalon			6	519.578
	6.2.9	KPHP Batu Ayau			10	1.500.000
	6.2.10	Tahura Bukit Soeharto			9	900.000
6.3	Penetapan Posko Dalkarhut (DBH SDA DR)		Jumlah Kegiatan Penetapan Posko Dalkarhutla	Kegiatan	85	4.795.165
	6.3.1	Dinas Kehutanan			11	800.000
	6.3.2	KPHP Berau Barat			18	264.345
	6.3.3	KPHP Bongan			5	320.000
	6.3.4	KPHP Meratus			20	1.123.600
	6.3.5	KPHP Kendilo			4	245.000
	6.3.6	KPHP Santan			5	750.000
	6.3.7	KPHP DAS Belayan			4	312.220
	6.3.8	KPHP Bengalon			3	130.000
	6.3.9	KPHP Batu Ayau			10	-
	6.3.10	Tahura Bukit Soeharto			5	850.000
6.4	Penaksiran Luas Kebakaran dan Investigasi Penyebab Kebakaran (DBH SDA DR)		Jumlah laporan Penafsiran Luas Areal Karhutla dan Investigasi Penyebab Kebakaran	Laporan	69	3.146.084
	6.4.1	Dinas Kehutanan			0	-
	6.4.2	KPHP Berau Barat			24	200.660
	6.4.3	KPHP Bongan			4	370.000
	6.4.4	KPHP Meratus			6	160.000
	6.4.5	KPHP Kendilo			10	296.000
	6.4.6	KPHP Santan			5	300.000
	6.4.7	KPHP DAS Belayan			2	317.100
	6.4.8	KPHP Bengalon			3	402.324
	6.4.9	KPHP Batu Ayau			10	300.000
	6.4.10	Tahura Bukit Soeharto			5	800.000
6.5	Sosialisasi/Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)		Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi/Kampanye Pencegahan	Laporan	142	8.674.114



	6.5.1	Dinas Kehutanan			10	1.250.000
	6.5.2	KPHP Berau Barat			36	639.810
	6.5.3	KPHP Bongan			5	970.000
	6.5.4	KPHP Meratus			10	1.097.600
	6.5.5	KPHP Kendilo			4	352.750
	6.5.6	KPHP Santan			10	650.000
	6.5.7	KPHP DAS Belayan			6	903.374
	6.5.8	KPHP Bengalon			6	410.580
	6.5.9	KPHP Batu Ayau			50	1.500.000
	6.5.10	Tahura Bukit Soeharto			5	900.000
6.6	Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)		Jumlah Laporan Kegiatan Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Laporan	231	9.641.380
	6.6.1	Dinas Kehutanan			40	600.000
	6.6.2	KPHP Berau Barat			30	975.425
	6.6.3	KPHP Bongan			5	670.000
	6.6.4	KPHP Meratus			30	1.975.350
	6.6.5	KPHP Kendilo			8	512.000
	6.6.6	KPHP Santan			18	975.000
	6.6.7	KPHP DAS Belayan			12	819.200
	6.6.8	KPHP Bengalon			12	514.405
	6.6.9	KPHP Batu Ayau			30	1.100.000
	6.6.10	Tahura Bukit Soeharto			46	1.500.000
6.7	Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)		Jumlah Laporan Kegiatan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan	Laporan	125	5.258.671
	6.7.1	Dinas Kehutanan			10	600.000
	6.7.2	KPHP Berau Barat			30	992.867
	6.7.3	KPHP Bongan			1	420.000
	6.7.4	KPHP Meratus			5	391.000
	6.7.5	KPHP Kendilo			4	320.000
	6.7.6	KPHP Santan			10	500.000
	6.7.7	KPHP DAS Belayan			8	234.550
	6.7.8	KPHP Bengalon			12	500.254
	6.7.9	KPHP Batu Ayau			10	500.000
	6.7.10	Tahura Bukit Soeharto			35	800.000
6.8	Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal Bekas Terbakar (DBH SDA DR)		Jumlah Dokumen Kegiatan Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal Bekas Terbakar	Dokumen	84	3.231.001
	6.8.1	Dinas Kehutanan			15	400.000
	6.8.2	KPHP Berau Barat			24	300.660
	6.8.3	KPHP Bongan			5	350.000
	6.8.4	KPHP Meratus			6	163.000
	6.8.5	KPHP Kendilo			4	164.000
	6.8.6	KPHP Santan			3	250.000
	6.8.7	KPHP DAS Belayan			8	331.375
	6.8.8	KPHP Bengalon			4	175.400
	6.8.9	KPHP Batu Ayau			7	346.566
	6.8.10	Tahura Bukit Soeharto			8	750.000
6.9	Gerakan Pencegahan Kebakaran Hutan (DBH SDA DR)		Jumlah Gerakan Pencegahan Karhutla	Kegiatan	23	1.433.540
	6.9.1	Dinas Kehutanan			0	-
	6.9.2	KPHP Berau Barat			0	-
	6.9.3	KPHP Bongan			6	350.000
	6.9.4	KPHP Meratus			2	402.500
	6.9.5	KPHP Kendilo			4	160.000
	6.9.6	KPHP Santan			0	-



	6.9.7	KPHP DAS Belayan			11	521.040
	6.9.8	KPHP Bengalon			0	-
	6.9.9	KPHP Batu Ayau			0	-
	6.9.10	Tahura Bukit Soeharto			0	-
6.10	Penerapan Agroforestry, Agrosilvopastura, Silvopastura (DBH SDA DR)		Luas Kegiatan Agroforestry, Agrosilvopastura, Silvopastura	Hektar	70	1.042.400
	6.10.1	Dinas Kehutanan			0	-
	6.10.2	KPHP Berau Barat			0	-
	6.10.3	KPHP Bongan			0	-
	6.10.4	KPHP Meratus			70	1.042.400
	6.10.5	KPHP Kendilo			0	-
	6.10.6	KPHP Santan			0	-
	6.10.7	KPHP DAS Belayan			0	-
	6.10.8	KPHP Bengalon			0	-
	6.10.9	KPHP Batu Ayau			0	-
	6.10.10	Tahura Bukit Soeharto			0	-
6.11	Pembentukan dan Pembinaan Brigade Pengendalian PKHL (DBH SDA DR)		Jumlah Pembentukan Regu Perbantuan Dalkarhutla	Regu/MPA	27	2.259.807
	6.11.1	Dinas Kehutanan			0	-
	6.11.2	KPHP Berau Barat			0	-
	6.11.3	KPHP Bongan			3	450.000
	6.11.4	KPHP Meratus			4	467.400
	6.11.5	KPHP Kendilo			4	245.000
	6.11.6	KPHP Santan			5	550.000
	6.11.7	KPHP DAS Belayan			11	547.407
	6.11.8	KPHP Bengalon			0	-
	6.11.9	KPHP Batu Ayau			0	-
	6.11.10	Tahura Bukit Soeharto			0	-
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)		Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang Ditangani	Kasus Tindak Pidana	39	19.858.635
01	Sosialisasi		Jumlah Laporan Kegiatan Sosialisasi	Laporan	91	4.398.005
	7.1.1	Dinas Kehutanan			-	-
	7.1.2	KPHP Berau Barat			24	596.660
	7.1.3	KPHP Bongan			-	-
	7.1.4	KPHP Meratus			10	982.000
	7.1.5	KPHP Kendilo			6	327.565
	7.1.6	KPHP Santan			3	150.000
	7.1.7	KPHP DAS Belayan			-	-
	7.1.8	KPHP Bengalon			4	291.780
	7.1.9	KPHP Batu Ayau			40	1.500.000
	7.1.10	Tahura Bukit Soeharto			4	550.000
02	Koordinasi		Jumlah Laporan Koordinasi	Laporan	68	2.487.300
	7.2.1	Dinas Kehutanan			11	500.000
	7.2.2	KPHP Berau Barat			24	847.300
	7.2.3	KPHP Bongan			-	-
	7.2.4	KPHP Meratus			-	-
	7.2.5	KPHP Kendilo			2	220.000
	7.2.6	KPHP Santan			3	120.000
	7.2.7	KPHP DAS Belayan			18	300.000
	7.2.8	KPHP Bengalon			-	-
	7.2.9	KPHP Batu Ayau			10	500.000
	7.2.10	Tahura Bukit Soeharto			-	-
03	Penjagaan di Tempat-Tempat Tertentu			Laporan	30	593.000



	7.3.1	Dinas Kehutanan			-	-
	7.3.2	KPHP Berau Barat			-	-
	7.3.3	KPHP Bongan			6	350.000
	7.3.4	KPHP Meratus			-	-
	7.3.5	KPHP Kendilo			24	243.000
	7.3.6	KPHP Santan			-	-
	7.3.7	KPHP DAS Belayan			-	-
	7.3.8	KPHP Bengalon			-	-
	7.3.9	KPHP Batu Ayau			-	-
	7.3.10	Tahura Bukit Soeharto			-	-
04	Patroli Pengamanan		Jumlah Laporan Patroli	Laporan	241	12.380.330
	7.3.1	Dinas Kehutanan			24	1.200.000
	7.3.2	KPHP Berau Barat			48	1.718.510
	7.3.3	KPHP Bongan			8	450.000
	7.3.4	KPHP Meratus			30	2.423.600
	7.3.5	KPHP Kendilo			8	1.120.000
	7.3.6	KPHP Santan			16	950.000
	7.3.7	KPHP DAS Belayan			18	886.174
	7.3.8	KPHP Bengalon			4	632.046
	7.3.9	KPHP Batu Ayau			60	1.500.000
	7.3.10	Tahura Bukit Soeharto			25	1.500.000
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)		Luas Hutan dan Lahan Kritis yang Direhabilitasi	Hektar	3910	109.967.878
01	Perencanaan		Luas Rancangan Kegiatan Penanaman	Hektar	4.870	6.749.490
	9.1.1.	Dinas Kehutanan			500	158.820
	9.1.2.	KPHP Berau Barat			800	1.191.000
	9.1.3.	KPHP Bongan			500	600.000
	9.1.4.	KPHP Meratus			470	431.068
	9.1.5.	KPHP Kendilo			300	2.007.452
	9.1.6.	KPHP Santan			600	315.000
	9.1.7.	KPHP DAS Belayan			400	646.150
	9.1.8.	KPHP Bengalon			-	-
	9.1.9.	KPHP Batu Ayau			1.000	1.000.000
	9.1.10.	Tahura Bukit Soeharto			300	400.000
02	Pelaksanaan		Luas Penanaman	Hektar	3.910	93.656.628
	9.2.1.	Dinas Kehutanan			350	6.257.420
	9.2.2.	KPHP Berau Barat			600	9.642.000
	9.2.3.	KPHP Bongan			100	12.274.567
	9.2.4.	KPHP Meratus			470	10.070.828
	9.2.5.	KPHP Kendilo			300	8.121.000
	9.2.6.	KPHP Santan			350	9.986.500
	9.2.7.	KPHP DAS Belayan			340	9.761.258
	9.2.8.	KPHP Bengalon			600	13.979.755
	9.2.9.	KPHP Batu Ayau			500	8.000.000
	9.2.10.	Tahura Bukit Soeharto			300	5.563.300
03	Monitoring dan Evaluasi		Jumlah Monev Deforestasi dan Degradasi Hutan dalam Rangka Mitigasi Perubahan Iklim	Laporan	134	9.561.760
	9.3.1.	Dinas Kehutanan			25	3.583.760
	9.3.2.	KPHP Berau Barat			17	355.000
	9.3.3.	KPHP Bongan			9	800.000
	9.3.4.	KPHP Meratus			5	243.000
	9.3.5.	KPHP Kendilo			12	380.000



	9.3.6.	KPHP Santan			10	1.100.000
	9.3.7.	KPHP DAS Belayan			4	400.000
	9.3.8.	KPHP Bengalon			5	250.000
	9.3.9.	KPHP Batu Ayau			40	2.000.000
	9.3.10.	Tahura Bukit Soeharto			7	450.000
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)		Jumlah SK Pengada dan Pengedar Benih dan/atau Bibit	Surat Keterangan	37	8.961.960
			Jumlah Bibit		60000	
	03.	Penyediaan Benih	Jumlah Sertifikasi Sumber Benih.	Sertifikat	16	584.950
	10.1.1.1.	Dinas Kehutanan			15	484.950
	10.1.1.2.	KPHP Berau Barat			-	-
	10.1.1.3.	KPHP Bongan			1	100.000
	10.1.1.4.	KPHP Meratus			-	-
	10.1.1.5.	KPHP Kendilo			-	-
	10.1.1.6.	KPHP Santan			-	-
	10.1.1.7.	KPHP DAS Belayan			-	-
	10.1.1.8.	KPHP Bengalon			-	-
	10.1.1.9.	KPHP Batu Ayau			-	-
	10.1.1.10.	Tahura Bukit Soeharto			-	-
	04.	Penyediaan Bibit	Jumlah Bibit yang Tersedia	Bibit	455.000	5.779.230
	10.2.1.1.	Dinas Kehutanan			60.000	780.000
	10.2.1.2.	KPHP Berau Barat			20.000	1.287.840
	10.2.1.3.	KPHP Bongan			10.000	100.000
	10.2.1.4.	KPHP Meratus			10.000	206.642
	10.2.1.5.	KPHP Kendilo			25.000	1.085.000
	10.2.1.6.	KPHP Santan			200.000	1.105.000
	10.2.1.7.	KPHP DAS Belayan			100.000	600.000
	10.2.1.8.	KPHP Bengalon			30.000	614.748
	10.2.1.9.	KPHP Batu Ayau			-	0
	10.2.1.10.	Tahura Bukit Soeharto			-	0
	05.	Pengedaran Benih dan Bibit	Jumlah SK Pengada dan Pengedar Benih dan/atau Bibit	SK	25	907.540
	10.3.1.1.	Dinas Kehutanan			15	284.200
	10.3.1.2.	KPHP Berau Barat			8	485.340
	10.3.1.3.	KPHP Bongan			-	-
	10.3.1.4.	KPHP Meratus			-	-
	10.3.1.5.	KPHP Kendilo			2	138.000
	10.3.1.6.	KPHP Santan			-	-
	10.3.1.7.	KPHP DAS Belayan			-	-
	10.3.1.8.	KPHP Bengalon			-	-
	10.3.1.9.	KPHP Batu Ayau			-	-
	10.3.1.10.	Tahura Bukit Soeharto			-	-
	06.	Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Benih	Jumlah Bimbingan dan Pengawasan	Laporan	60	1.690.240
	10.4.1.1.	Dinas Kehutanan			30	1.250.850
	10.4.1.2.	KPHP Berau Barat			12	173.490
	10.4.1.3.	KPHP Bongan			-	-
	10.4.1.4.	KPHP Meratus			-	-
	10.4.1.5.	KPHP Kendilo			15	140.900
	10.4.1.6.	KPHP Santan			3	125.000
	10.4.1.7.	KPHP DAS Belayan			-	-
	10.4.1.8.	KPHP Bengalon			-	-
	10.4.1.9.	KPHP Batu Ayau			-	-
	10.4.1.10.	Tahura Bukit Soeharto			-	-



3.04.51	Program Pengelolaan KPHP		Jumlah Unit Usaha Produktif Kehutanan oleh KPH dan Masyarakat melalui Pengelolaan Hutan Lestari	Unit Usaha	32	38.924.120	
			Persentase Kerusakan Kawasan Hutan yang menurun (%)	%	1,95		
01.	Kegiatan Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan		Luas Pengelolaan Wilayah Tertentu (WT) di KPHP	Ha	485	34.797.326	
			Jumlah Pembinaan/Pemantauan Unit Manajemen Pemegang Izin di Dalam Kawasan KPHP	Unit Manajemen	67		
		KPHP DAS Belayan		Luas Pengelolaan Wilayah Tertentu (WT) di KPHP		20	3.385.000
				Jumlah Pembinaan /Pemantauan Unit Manajemen Pemegang Izin di Dalam Kawasan KPHP		8	
		KPHP Berau Barat		Luas Pengelolaan Wilayah Tertentu (WT) di KPHP		20	6.295.700
				Jumlah Pembinaan/Pemantauan Unit Manajemen Pemegang Izin di Dalam Kawasan KPHP		8	
		KPHP Santan		Luas Pengelolaan Wilayah Tertentu (WT) di KPHP		60	2.990.978
				Jumlah Pembinaan/Pemantauan Unit Manajemen Pemegang Izin di Dalam Kawasan KPHP		11	
		KPHP Bengalon		Luas Pengelolaan Wilayah Tertentu (WT) di KPHP		100	1.990.000
				Jumlah Pembinaan/Pemantauan Unit Manajemen Pemegang Izin di Dalam Kawasan KPHP		10	
		KPHP Batu Ayau		Luas Pengelolaan Wilayah Tertentu (WT) di KPHP		15	10.679.930
				Jumlah Pembinaan/Pemantauan Unit Manajemen Pemegang Izin di Dalam Kawasan KPHP		15	
		KPHP Bongan		Luas Pengelolaan Wilayah Tertentu (WT) di KPHP		50	5.808.100
				Jumlah Pembinaan/Pemantauan Unit Manajemen Pemegang Izin di Dalam Kawasan KPHP		8	
		KPHP Kendilo		Luas Pengelolaan Wilayah Tertentu (WT) di KPHP		20	1.781.618
				Jumlah Pembinaan/Pemantauan Unit Manajemen Pemegang Izin di Dalam Kawasan KPHP		2	
		KPHP Meratus		Luas Pengelolaan Wilayah Tertentu (WT) di KPHP		200	1.866.000
				Jumlah Pembinaan/Pemantauan Unit Manajemen Pemegang Izin di Dalam Kawasan KPHP		5	
02.	Kegiatan Perlindungan, KSDAE, dan Pemberdayaan Masyarakat		Luas Kerusakan Hutan dan Konflik Tenurial di Tingkat Tapak	Ha	1.260	2.554.373	
			Jumlah Unit Usaha Produktif Masyarakat dalam Pengelolaan	Unit Usaha	24	-	



			Hutan Secara Lestari di Tingkat Tapak			
11.2.1.			Luas Kerusakan Hutan dan Konflik Tenurial di Tingkat Tapak		200	374.588
	KPHP DAS Belayan		Jumlah Unit Usaha Produktif Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Secara Lestari di Tingkat Tapak		2	
11.2.2.			Luas Kerusakan Hutan dan Konflik Tenurial di Tingkat Tapak		100	370.000
	KPHP Berau Barat		Jumlah Unit Usaha Produktif Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Secara Lestari di Tingkat Tapak		4	
11.2.3.			Luas Kerusakan Hutan dan Konflik Tenurial di Tingkat Tapak		250	136.750
	KPHP Santan		Jumlah Unit Usaha Produktif Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Secara Lestari di Tingkat Tapak		1	
11.2.4.			Luas Kerusakan Hutan dan Konflik Tenurial di Tingkat Tapak		250	389.400
	KPHP Bengalon		Jumlah Unit Usaha Produktif Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Secara Lestari di Tingkat Tapak		2	
11.2.5.			Luas Kerusakan Hutan dan Konflik Tenurial di Tingkat Tapak		10	198.120
	KPHP Batu Ayau		Jumlah Unit Usaha Produktif Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Secara Lestari di Tingkat Tapak		4	
11.2.6.			Luas Kerusakan Hutan dan Konflik Tenurial di Tingkat Tapak		200	207.600
	KPHP Bongan		Jumlah Unit Usaha Produktif Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Secara Lestari di Tingkat Tapak		3	
11.2.7.			Luas Kerusakan Hutan dan Konflik Tenurial di Tingkat Tapak		200	195.165
	KPHP Kendilo		Jumlah Unit Usaha Produktif Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Secara Lestari di Tingkat Tapak		6	
11.2.8.			Luas Kerusakan Hutan dan Konflik Tenurial di Tingkat Tapak		50	682.750
	KPHP Meratus		Jumlah Unit Usaha Produktif Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Secara Lestari di Tingkat Tapak		2	
03.	Kegiatan Pembangunan Kantor Resort KPH (DAK)		Jumlah Kantor Resort KPH (DAK)	Unit	1	448.821
	11.3.1	Dinas Kehutanan			-	-
	11.3.2	KPHP Berau Barat			-	-
	11.3.3	KPHP Bongan			-	-
	11.3.4	KPHP Meratus			-	-
	11.3.5	KPHP Kendilo			-	-
	11.3.6	KPHP Santan			1	448.821



	11.3.7	KPHP DAS Belayan			-	-
	11.3.8	KPHP Bengalon			-	-
	11.3.9	KPHP Batu Ayau			-	-
	11.3.10	Tahura Bukit Soeharto			-	-
04.	Kegiatan Pembangunan Kantor Resort KPH (Dana Pendamping DAK)		Jumlah Pembangunan Kantor Resort KPH (Dana Pendamping DAK)	Unit	1	97.100
	11.4.1	Dinas Kehutanan			-	-
	11.4.2	KPHP Berau Barat			-	-
	11.4.3	KPHP Bongan			-	-
	11.4.4	KPHP Meratus			-	-
	11.4.5	KPHP Kendilo			-	-
	11.4.6	KPHP Santan			1	97.100
	11.4.7	KPHP DAS Belayan			-	-
	11.4.8	KPHP Bengalon			-	-
	11.4.9	KPHP Batu Ayau			-	-
	11.4.10	Tahura Bukit Soeharto			-	-
05.	Kegiatan Pemeliharaan Tanaman (DAK)		Luas Areal Pemeliharaan Tanaman		200	782.100
	11.5.1	Dinas Kehutanan			-	-
	11.5.2	KPHP Berau Barat			-	-
	11.5.3	KPHP Bongan			100	450.000
	11.5.4	KPHP Meratus			-	-
	11.5.5	KPHP Kendilo			-	-
	11.5.6	KPHP Santan			-	-
	11.5.7	KPHP DAS Belayan			100	332.100
	11.5.8	KPHP Bengalon			-	-
	11.5.9	KPHP Batu Ayau			-	-
	11.5.10	Tahura Bukit Soeharto			-	-
06.	Kegiatan Pemeliharaan Tanaman (Dana Pendamping DAK)		Luas Areal Pemeliharaan Tanaman	hektar	200	244.400
	11.7.1	Dinas Kehutanan			-	-
	11.7.2	KPHP Berau Barat			-	-
	11.7.3	KPHP Bongan			100	200.000
	11.7.4	KPHP Meratus			-	-
	11.7.5	KPHP Kendilo			-	-
	11.7.6	KPHP Santan			-	-
	11.7.7	KPHP DAS Belayan			100	44.400
	11.7.8	KPHP Bengalon			-	-
	11.7.9	KPHP Batu Ayau			-	-
	11.7.10	Tahura Bukit Soeharto			-	-
3.04.50	Program Pengelolaan Tahura Bukit Soeharto		Luas Kawasan Hutan Tahura yang Dikelola	hektar	150 ha	320.400
	01.	Kegiatan Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Luas Penataan Kawasan Hutan Konservasi di Tingkat Tapak dan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan Secara Lestari	Ha	150	270.400
	02.	Kegiatan Perlindungan, KSDAE, dan Pemberdayaan Masyarakat	Luas Penanganan Degradasi dan Deforestasi serta Konflik Tenurial	hektar	150	50.000
3.04.53	Program Pengelolaan KPH Lindung		Luas Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung	hektar	50 Ha	179.936
	11.	Kegiatan Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Luas Penataan Kawasan Hutan Lindung di Tingkat Tapak dan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan Secara Lestari	Ha	50	79.936
	12.	Kegiatan Perlindungan, KSDAE, dan	Luas Pengelolaan Kawasan	Ha	50	100.000



		Pemberdayaan Masyarakat	Hutan Lindung di Tingkat Tapak Secara Lestari			
3.04.07		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Pelayanan PD (SKM)	%	85	10.846.861
	14.1.	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran		12	10.846.861
		14.1.1. Dinas Kehutanan			12	3.376.435
		14.1.2. KPHP Berau Barat			12	616.850
		14.1.3. KPHP Bongan			12	1.076.890
		14.1.4. KPHP Meratus			12	746.450
		14.1.5. KPHP Kendilo			12	721.297
		14.1.6. KPHP Santan			12	657.950
		14.1.7. KPHP DAS Belayan			12	1.287.420
		14.1.8. KPHP Bengalon			12	800.125
		14.1.9. KPHP Batu Ayau			12	716.850
		14.1.10. Tahura Bukit Soeharto			12	846.594
3.04.08		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit Kerja PD yang memiliki Kinerja Pelayanan Tepat Waktu	Unit	5	8.274.548
	15.1.	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Bulan	12	3.477.685
		15.1.1. Dinas Kehutanan			12	773.900
		15.1.2. KPHP Berau Barat			12	352.980
		15.1.3. KPHP Bongan			12	310.500
		15.1.4. KPHP Meratus			12	136.600
		15.1.5. KPHP Kendilo			12	242.950
		15.1.6. KPHP Santan			12	112.430
		15.1.7. KPHP DAS Belayan			12	299.792
		15.1.8. KPHP Bengalon			12	467.583
		15.1.9. KPHP Batu Ayau			12	250.700
		15.1.10. Tahura Bukit Soeharto			12	530.250
	15.2.	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Bulan	12	4.796.863
		15.2.1. Dinas Kehutanan			12	1.264.050
		15.2.2. KPHP Berau Barat			12	287.950
		15.2.3. KPHP Bongan			12	385.510
		15.2.4. KPHP Meratus			12	505.400
		15.2.5. KPHP Kendilo			12	1.115.350
		15.2.6. KPHP Santan			12	112.430
		15.2.7. KPHP DAS Belayan			12	195.700
		15.2.8. KPHP Bengalon			12	215.817
		15.2.9. KPHP Batu Ayau			12	513.000
		15.2.10. Tahura Bukit Soeharto			12	201.656
3.04.09		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang Memiliki Standar Kompetensi	%	85%	6.133.295
	01.	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Bulan	12	4.503.920
		16.1.1. Dinas Kehutanan			12	2.185.000
		16.1.2. KPHP Berau Barat			12	218.100
		16.1.3. KPHP Bongan			12	219.500
		16.1.4. KPHP Meratus			12	421.400
		16.1.5. KPHP Kendilo			12	278.020



	16.1.6.	KPHP Santan			12	261.600
	16.1.7.	KPHP DAS Belayan			12	171.100
	16.1.8.	KPHP Bengalon			12	291.200
	16.1.9.	KPHP Batu Ayau			12	331.000
	16.1.10.	Tahura Bukit Soeharto			12	127.000
02.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Terpenuhinya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Stell	837	1.629.375
	16.2.1.	Dinas Kehutanan			170	421.000
	16.2.2.	KPHP Berau Barat			73	51.100
	16.2.3.	KPHP Bongan			45	29.000
	16.2.4.	KPHP Meratus			38	169.400
	16.2.5.	KPHP Kendilo			42	58.600
	16.2.6.	KPHP Santan			68	221.900
	16.2.7.	KPHP DAS Belayan			140	120.000
	16.2.8.	KPHP Bengalon			65	173.875
	16.2.9.	KPHP Batu Ayau			82	282.400
	16.2.10.	Tahura Bukit Soeharto			114	102.100
17.	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan		Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akip	70	1.306.500
	17.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Dokumen	10	667.100
	17.2.	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Dokumen	5	639.400
	17.3.	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (DBH SDA DR)	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian		-	-
18.	Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (DBH SDA DR)		Persentasi Realisasi Keuangan DBH SDA DR Meningkat	%	25	978.416
	18.1.	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (DBH SDA DR)	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian	Laporan	3	978.416
						328.215.058

3.2. Cara Melaksanakan Kegiatan

Strategi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, selain dirancang untuk merespon isu strategis juga dirancang dengan mengakomodir 'Strategi Pembangunan Daerah sebagai suatu strategi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

Dimana Kegiatan pembangunan Kehutanan diprioritaskan untuk mendanai kegiatan prioritas yang tercantum dalam RPJMD tahun 2013-2018 dan



prioritas SKPD Dinas Kehutanan yang tercantum dalam Renstra tahun 2013-2018, adapun target dan sasaran Renstra Dinas Kehutanan tahun 2019 sesuai table 3.2.

Tabel 3.3. Sasaran Strategis Dinas Kehutanan Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Optimalisasi Pemanfaatan dan pengelolaan hutan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan perekonomian daerah	Realisasi Produksi Hasil Hutan Kayu	M3	4.900.000,-
		Realisasi Hasil Hutan Bukan Kayu	Ton	6,5

3.3. Indikator Kerja Utama (IKU)

Indikator Kerja Utama (IKU) SKPD Dinas Kehutanan yaitu **Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan hutan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan perekonomian daerah** dengan Indikator Realisasi Produksi Hasil Hutan Kayu dan Realisasi Hasil Hutan Bukan Kayu

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) OPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 merupakan dokumen yang dipersyaratkan dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan rencana sebagai turunan dari rencana strateis yang berjangka waktu satu tahun. Rencana kinerja memberikan gambaran yang lebih mendetail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya. Dokumen ini memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan. Indikator-indikator kinerja dari kegiatan berupa output dan indikator program berupa outcome ditentukan dalam dokumen ini sehingga diharapkan kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur capaian kinerjanya. Pada tahun 2020 OPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan 18 program pembangunan dan 56 kegiatan guna mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Disamping itu kemampuan menyusun rencana kinerja dan sasaran yang jelas dengan besaran yang terukur, lokasi, waktu, kelompok sasaran dan manfaat bagi kelompok sasaran. Kehadiran sistem anggaran yang terpadu



berbasis kinerja akan membuka peluang untuk bekerja lebih optimal dan mencerminkan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja dan berkerangka jangka menengah.

Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergisme dan keterpaduan pelaksanaan pembangunan melalui pemantapan sistem dan metode perencanaan, peningkatan koordinasi antar instansi terkait. Dengan demikian hal-hal yang terkait dengan aspek potensi, tantangan dan hambatan dapat diselesaikan dengan baik.

